

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT**

BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA

Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta 10710 Telp. (021) 3521974 Fax. (021) 3521985

NOTA DINAS

NOMOR : AK.03.02/150-1/SET.M.EKON.01/07/2025

Kepada Yth : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Dari : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Hal : Pemohonan Penandatanganan Laporan Kinerja TW I dan II tahun 2025
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Tanggal : 7 Juli 2025

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga agar dapat menyusun dan menetapkan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kinerja yang telah dicapai, berkenaan dengan hal tersebut dengan hormat kami laporkan hal-hal berikut:

1. Permen PAN-RB No. 88 Tahun 2021 mengamanahkan kepada setiap unit kerja untuk dapat menyusun Laporan Kinerja triwulanan dan pimpinan unit kerja dapat terlibat langsung pada penyusunan laporan tersebut dalam bentuk pengesahan dokumen laporan kinerja
2. Sehubungan dengan poin 1, unit kerja Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama telah mengkoordinasikan dan penyusunan laporan kinerja triwulan I dan II sebagaimana terlampir didalamnya terdapat informasi tentang capaian hasil pengukuran kinerja, pelaksanaan rencana aksi, capaian program, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kendala serta upaya perbaikan pencapaian target
3. Apabila Bapak berkenan dan tidak berpendapat lain atas laporan kinerja triwulan I dan II yang telah disusun, kami mohon untuk dapat mengesahkan dokumen tersebut

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama 



Evita Manthovani
NIP. 197106061992012001

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
Sasaran Program 1. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing					
1.1	Nilai Reformasi Birokrasi General	Nilai	84,01	84,01**	100%**
1.2	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	Nilai	6,76	6,76**	100%**
Sasaran Program 2. Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas					
2.1	Tingkat Input Maturitas Sirkular	Persentase	9,2%	9,2%**	100%**
2.2	Pengeluaran Perkapita Laki – Laki dan Perempuan	Nilai	Laki-laki 16.891; Perempuan 9.920	Laki-laki **16.891; Perempuan ** 9.920	100%**
Sasaran Program 3. Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif					
3.1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Dimanfaatkan	Persentase	100%	25%*	100%*
Sasaran Program 4. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Sesuai dengan Standar Nasional					
4.1	Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase	100%	25%*	100%*
Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Prima yang Berkualitas					
5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	Indeks	3 dari 4	3 dari 4*	100%*
Sasaran Program 6. Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik					
6.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat	Persentase	85%	25%*	100%*

Keterangan :

* Masih bersifat prediksi serta target dipecah ke triwulanan dan menjadi dasar perhitungan capaian kinerja

** Masih bersifat prediksi berdasarkan tren data dari tahun ke tahun serta *activity* yang dilaksanakan dan target bersifat tahunan sehingga tidak dapat dipecah ke triwulanan

Kinerja Sekretariat Kementerian sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Program 1: Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing
----------	--

Pencapaian Sasaran Program 1 : Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Nilai Reformasi Birokrasi General
2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**1.1. Nilai
Reformasi
Birokrasi
General**

Latar Belakang

Kemenko Perekonomian mengukur tingkat kemajuan Reformasi Birokrasi melalui 2 indikator, yaitu : Nilai RB General dan Nilai RB Tematik. Reformasi Birokrasi (RB) General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan isu-isu struktural (hulu) yang mencakup penguatan tata kelola organisasi, efektivitas atas proses bisnis, sistem kerja, dan peningkatan layanan publik. Pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi General ini berpedoman pada Permen PAN-RB No. 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Nilai RB General dihitung berdasarkan penilaian Kementerian PAN-RB terhadap capaian pelaksanaan pada indikator Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan. Setiap indikator memiliki bobot dan kriteria penilaian tertentu. Indikator RB General Kemenko Perekonomian terdiri dari 28 Indikator :

1. Rencana Aksi Pembangunan RB General
2. Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General
3. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi
4. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
5. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
6. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
7. Nilai SAKIP
8. Indeks Perencanaan Pembangunan
9. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE
10. Tingkat Digitalisasi Arsip
11. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
12. Indeks Pengelolaan Aset
13. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)
14. Indeks Kualitas Kebijakan Publik
15. Indeks Reformasi Hukum (IRH)
16. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor
17. Indeks Tata Kelola Pengadaan
18. Indeks Sistem Merit
19. Indeks Pelayanan Publik
20. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
21. Indeks SPBE
22. Capaian Prioritas Nasional
23. Capaian Indikator Kinerja Utama

24. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
25. Tindaklanjut Rekomendasi
26. Indeks BerAKHLAK
27. Survei Penilaian Integritas
28. Survey Kepuasan Masyarakat.

Komponen yang dinilai pada RB General sebagai berikut :

No.	Komponen Penilaian	Bobot
A	Komponen Pengungkit	
	I. Pemenuhan	20,00
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00
	III. Reform	30,00
	Total Komponen Pengungkit	60,00
B	Komponen Hasil	
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00
4.	Kinerja Organisasi	10,00
	Total Komponen Hasil	40,00
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00

Tujuan dari IKU ini untuk dapat menggambarkan pelaksanaan atas RB General di lingkungan Kemenko Perekonomian dijalankan secara konsisten, terukur dan ber kelanjutan sehingga menjadi alat ukur keberhasilan terhadap tata kelola organisasi

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I tahun 2025, Nilai Reformasi Birokrasi yang terealisasi sebesar 84,01. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan hingga TW I 2025, dengan ringkasan :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi Triwulan I	%Kinerja
IKU 1.1 Nilai Reformasi Birokrasi General	Nilai	84,01**	84,01**	100%**

****nilai RB General dikeluarkan di akhir tahun oleh Kemenpan.**

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2024 yang disampaikan oleh Kementerian PANRB pada tanggal 26 Februari 2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperoleh nilai **88,58** atau mengalami kenaikan **3,53 poin** dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini terutama didorong oleh capaian **RB General** yang naik sebesar **4,47 poin**, meskipun pada aspek **RB Tematik** mengalami penurunan sebesar **0,94 poin**.

Secara historis, tren nilai RB Kemenko Perekonomian menunjukkan peningkatan konsisten, dari **78,63 (2021)**, **77,95 (2022)**, **85,05 (2023)** hingga **88,58 (2024)**. Hasil ini mencerminkan perbaikan kinerja kelembagaan, penguatan sistem kerja birokrasi, serta optimalisasi implementasi program prioritas Reformasi Birokrasi

Berdasarkan rekapitulasi indikator RB General, Proyeksi nilai RB General tahun 2025 adalah 84,01. Beberapa Indikator Reformasi Birokrasi General yang telah menunjukkan capaian optimal antara lain :

- Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General (100%)

- Persentase Penyederhaan Struktur Organisasi (100%)
- Nilai SAKIP 75 (75 dengan bobot penuh 3,00)
- Opni BPK WTP (5 poin)
- Capaian IKU (100%)
- Capaian Prioritas Nasional (100%)

Namun demikian, terdapat indikator yang masih rendah dan perlu perhatian lebih, seperti :

- Tingkat Keberhasilan Zona Integritas (0,5 dari 3)
- Tindak lanjut Rekomendasi BPK (63,76%)
- Indeks BerAKHLAK (82,67, masih dibawah target 85)
- Survey Penilaian Integritas (81,81 dari target 82)
- Indeks Tata Kelola Pengadaan (75,76 dari target 85)

Meskipun capaian Reformasi Birokrasi tahun 2024 secara umum menunjukkan peningkatan, terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan sehingga memerlukan perhatian dan perbaikan. Pada aspek Rencana Aksi RB General, nilai turun dari 2,78 menjadi 2,55, yang menunjukkan masih adanya kelemahan dalam konsistensi pelaksanaan serta kelengkapan bukti dukung. Indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) juga mengalami penurunan dari 91,58 menjadi 89,62, yang mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas layanan publik melalui tindak lanjut keluhan masyarakat dan inovasi pelayanan.

Selain itu, Capaian Prioritas Nasional menurun cukup signifikan dari 100 menjadi 89,57, sehingga diperlukan evaluasi ulang terhadap mekanisme pelaporan capaian serta penguatan koordinasi antarunit untuk memastikan keterpaduan program. Penurunan juga terjadi pada indikator Tindak Lanjut Rekomendasi BPK/Inspektorat, dari 70,7 menjadi 63,76, yang menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih ketat dalam memastikan seluruh rekomendasi hasil audit dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan menyeluruh.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

IKU 1.1 Nilai Reformasi Birokrasi General			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Melaksanakan reviuw hasil evaluasi RB General Tahun sebelumnya	Terlaksana	Telah melaksanakan reviuw hasil evaluasi RB General tahun sebelumnya
2.	Penyusunan draft rencana aksi RB	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • UND rapat teknis penyusunan Rencana Aksi RB General dengan No surat

	General tahun 2025		OT.05/50/SET.M.EKON.2/07/2025 <ul style="list-style-type: none"> • ND Permintaan penyusunan konsep Rencana Aksi RB General tahun 2025 No. OT.05/129/SET.M.EKON.2/07/2025 tabel penyusunan renaksi RB 2025 termuat pada link url tinyurl.com/RenaksiRB2024 <ul style="list-style-type: none"> • UND rapat dan finalisasi penyusunan Rencana Aksi RB General dengan no surat OT.05/58/SET.M.EKON.2/07/2025
3.	Pembentukan Tim Monev RB	Terlaksana	Tim RB telah memformulasikan PIC dalam memonitoring dan mengevaluasi implementasi rencana aksi RB di setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat.
4.	Penentuan platform/tools yang akan digunakan dalam melaksanakan RB General	Terlaksana	Telah menentukan platform berbagi pakai yang akan digunakan dalam melaksanakan RB General berbasis Cloud dan website
5.	Pelibatan atau audiensi internal tentang penyusunan Rencana Aksi tahun 2025	Terlaksana	Telah melaksanakan audiensi internal tentang penyusunan Rencana Aksi Tahun 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya berupa penghematan anggaran melalui optimalisasi ruang rapat sebagai sarana pendukung koordinasi

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Hingga TW I rencana aksi terkendala dalam proses perumusan dikarenakan perlu melakukan penyesuaian dengan kebijakan nasional pelaksanaan RB 2025-2029 dari Kemenpan RB
- Perlu dilakukan penyesuaian dokumen kinerja organisasi dengan RPJMN 2025-2029 sehingga menjadi kendala dalam penyusunan dokumen perencanaan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Melaksanakan koordinasi yang berkesinambungan dengan Kementerian PAN RB untuk memperoleh informasi yang akurat

**1.2. Nilai
Reformasi
Birokrasi
Tematik**

Latar Belakang

Reformasi Birokrasi Tematik diarahkan untuk menyelesaikan akar permasalahan tata kelola di sektor – sektor prioritas sehingga berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan RB pada periode transisi tahun 2025. Tema RB Tematik pada periode 2025 – 2029 meliputi :

1. RB Pengentasan Kemiskinan
Tema RB ini diarahkan pada perbaikan tata Kelola dengan berfokus pada kolaborasi lintas instansi dalam penyelesaian akar masalah pengelolaan program kemiskinan, agar pemanfaatan anggaran kemiskinan dapat memberikan dampak yang optimal dalam menurunkan angka kemiskinan.
2. RB Peningkatan Investasi
Tema RB ini diarahkan untuk memperbaiki tata kelola sebagai dukungan terhadap kemudahan investasi. Upaya yang dilakukan mencakup penyederhanaan proses bisnis dan regulasi, percepatan proses perizinan, peningkatan koordinasi antar instansi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan public untuk mendorong peningkatan realisasi investasi
3. RB Mendorong Hilirisasi
Tema RB ini diarahkan pada penguatan tata kelola dan kolaborasi antar-lembaga dan daerah dalam mendukung transformasi ekonomi dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi dari produk dalam negeri.
4. RB Mendorong peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan
Tema RB ini diarahkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan percepatan peningkatan akses dan mutu layanan Kesehatan baik primer maupun lanjutan. Sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan Kesehatan yang merata, aman, dan bermutu kepada setiap Masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
5. RB Mendukung Ketahanan Pangan
Tema RB ini diarahkan untuk mendukung prioritas actual Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan dan mengurangi tingkat kerawanan pangan di daerah. Birokrasi diarahkan untuk melaksanakan tata kelola dalam Upaya mewujudkan transformasi pengelolaan pertanian dari tradisional menjadi pertanian modern dengan mendorong peningkatan produksi pangan
6. RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan
Pada tema RB ini diarahkan untuk melaksanakan tata kelola dalam mewujudkan transformasi Pendidikan yang berkualitas dan bermutu

Penilaian Rencana Aksi tematik dilakukan atas :

- Rencana tindak lanjut dan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi untuk tema RB Pengentasan Kemiskinan dan RB Peningkatan Investasi; sedangkan

- 3 tema RB Tematik lainnya (RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting, RB Pengendalian Inflasi, dan RB Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) menggunakan nilai tahun sebelumnya.
- **Khusus untuk 4 (empat) tema RB Tematik baru** (RB Mendorong Hilirisasi, RB Mendorong Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, RB Mendorong Ketahanan Pangan, serta RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan), TPN akan melakukan reviu terhadap Rencana Aksi dan laporan monitoring dan evaluasi yang disusun oleh instansi pemerintah, dengan catatan :
 - A. Reviu tersebut bertujuan untuk memberikan saran dan masukan dalam rangka peningkatan kualitas Rencana Aksi di tahun berikutnya.
 - B. Hasil reviu atas 4 (empat) tema RB Tematik baru tidak mempengaruhi penilaian Indeks RB Tahun 2025.

Tujuan dari indikator kinerja utama ini, untuk menggambarkan tingkat keterlibatan Kemenko Perekonomian dalam penyelesaian isu-isu strategis nasional yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU ini pada tahun 2025 bernilai 6,67 poin. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada target peningkatan tahun sebelumnya. Hingga Triwulan I tahun 2025, nilai Reformasi Birokrasi Tematik belum dapat ditentukan karena penilaian dilaksanakan pada akhir tahun oleh Kemenpan RB. Penilaian berdasarkan aktifitas yang telah dilaksanakan dapat diringkaskan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi Triwulan I	%Kinerja
IKU 1.2 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	Nilai	6,67**	100%**	100%**

**Hasil Realisasi dan %Kinerja TW I berdasarkan pengukuran activity,*

Pada tanggal 31 July 2025, Kementerian PAN-RB telah memberikan SE No. 6 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025. SE ini disusun untuk menjadi panduan bagi instansi pemerintah dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan yang selaras dengan tujuan dan sasaran RB nasional. Dengan demikian, pelaksanaan RB dapat berjalan secara lebih terintegrasi, terarah dan terukur dalam peningkatan kualitas tata kelola.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu prioritas nasional yang tercantum dalam dokumen Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029. Komitmen ini menunjukkan bahwa pelaksanaan RB tidak hanya menjadi agenda internal pemerintah, tetapi juga bagian integral dari visi reformasi birokrasi nasional untuk mewujudkan birokrasi kompetitif berkelas dunia untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Kemenko Perekonomian melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian antar lintas Kementerian/Lembaga melalui peningkatan efektifitas program, sinergisitas lintas instansi dan penguatan pemberdayaan. Bentuk intervensi yang dapat dilakukan antara lain :

1. RB Pengentasan Kemiskinan,
 - a. Penguatan koordinasi lintas instansi dalam penanggulangan Kemiskinan
 - b. Instansi program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin
 - c. Penyederhanaan proses penyaluran bansos melalui sisten digital terintegrasi
 - d. Peningkatan akutasi data kemiskinan dan penguatan pemanfaatan data kemiskinan
 - e. Penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunikasi dan UMKM
 - f. Inovasi model intervensi berbasis lokal untuk pengentasan kemiskinan ekstrem
2. RB Peningkatan Investasi,
 - a. Penyederhanaan proses perizinan investasi pusat dan daerah
 - b. Penguatan pelayanan public melalui pengembangan digitalisasi pelayanan public terpadu
 - c. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan proses izin
 - d. Inovasi penyediaan layanan pendampingan bagi Investor
 - e. Pemeberian intensif yang mendorong peningkatan investasi di sektor-sektor prioritas
 - f. Penguatan SDM pelayanan perizinan dan pengawasan investasi
3. RB Mendorong Hilirisasi,
 - a. Penyederhanaan perizinan di sektor hilirisasi
 - b. Intensif fiscal dan non-fiskal untuk industry pengolahan
 - c. Penguatan kolaborasi regulasi antar instansi pemerintahan
 - d. Pengembangan riset dan inovasi teknologi hilirisasi
 - e. Peningkatan efisiensi logistic dan infrastruktur pendukung hilirisasi
4. RB Mendorong peningkatan kualitas dan akses layanan Kesehatan,
 - a. Penerapan teknologi digital dalam pelayanan
 - b. Penguatan interoperabilitas data Kesehatan antar unit layanan dan antar tingkat pemerintahan
 - c. Peningkatan kapasitas SDM layanan Kesehatan
 - d. Penguatan pengambilan Keputusan berbasis data untuk peningkatan mutu layanan
5. RB Mendukung Ketahanan Pangan,
 - a. Peningkatan produksi pangan nasional berbasis teknologi dan inovasi pertanian
 - b. Pengautan tata kelola distribusi dan logistic pangan
 - c. Diversifikasi pangan sesuai potensi local
 - d. Pengurangan *food loss* dan *waste* diseluruh rantai pasok pangan
 - e. Peningkatan keterjangkauan pangan bagi Masyarakat miskin dan rentan
6. RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan
 - a. Peningkatan tata kelola Pendidikan yang baik
 - b. Digitalisasi berbasis teknologi dan inovasi dalam pendidikan

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

IKU 1.1 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Melaksanakan reviu hasil evaluasi RB Tematik tahun sebelumnya	Terlaksana	Telah melaksanakan reviu dan rencana perbaikan atas hasil evaluasi RB Tematik tahun 2024
2.	Penyusunan draft Rencana Aksi RB Tematik tahun 2025	Tertunda	Rencana aksi RB Tematik akan disusun pada triwulan selanjutnya, karena adanya perubahan RPJMN yang baru
3.	Pembentukan <i>Person In Charge</i> (PIC) RB Tematik	Tertunda	Pembentukan <i>Person In Charge</i> (PIC) RB Tematik, akan dilaksanakan pada saat rapat penyusunan rencana aksi RB Tematik 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi diatas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- Mengagendakan rapat koordinasi penyusunan RB Tematik kepada seluruh unit kerja terkait, dalam memfinalkan rencana aksi RB Tematik
- Melaksanakan koordinasi dengan Kemenpan RB sebagai guidance dalam penyusunan rencana aksi RB Tematik

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya berupa penghematan anggaran melalui optimalisasi ruang rapat sebagai sarana pendukung agenda RB. Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Kemenko Bidang Perekonomian Menyusun rencana aksi berdasarkan Surat Edaran Kemenpan RB tentang pelaksanaan RB pada setiap tahunnya, lalu terjadi perubahan RPJMN yang menjadikan keterlambatan Kemenpan RB dalam Menyusun SE ini yang berimplikasi pada keterlambatan K/L dalam Menyusun rencana aksi RB Tematik

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2024, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Mempercepat penyusunan draft rencana aksi RB Tematik untuk Kemenko Bidang Perekonomian, setelah SE dari Kemenpan RB telah keluar

2

Sasaran Program 2 : Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 2 : Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Tingkat Input Material Sirkular
2. Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan

2.1 Tingkat Input Latar Belakang

Material Sirkular

Berdasarkan Peta Jalan (*Road Map*) dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular 2045. Terdapat 5 (lima) sektor prioritas penerapan ekonomi sirkular yaitu sektor pangan, tekstil, konstruksi, elektronik, dan retail (berfokus pada kemasan plastik). Tingkat input material sirkular merupakan indikator yang digunakan untuk mencapai sasaran dalam meningkatkan efisiensi, daya guna, dan daur ulang sumber daya dan material. Khususnya dalam hal penggunaan kembali material (*reuse*), daur ulang (*recycle*), dan pemanfaatan materi limbah kembali ke dalam rantai produksi. Penyusunan tingkat material sirkular (*circular material input rate*) berkaitan erat dengan kebutuhan global untuk beralih dari model ekonomi linear ke ekonomi sirkular yang lebih berkelanjutan.

Berdasarkan RPJMN 2025 - 2029, proyek prioritas yang menjadi kawalan Kementerian Perekonomian dalam menkoordinasikan kebijakan pada sektor Material Sirkular adalah :

1. Pengembangan kebijakan, teknologi dan fasilitasi pengelolaan sampah dengan prinsip sirkular
2. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Nikel
3. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Tembaga
4. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Bauksit
5. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Timah
6. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Kimia

Tingkat input material sirkular disusun sebagai alat ukur untuk mengevaluasi dan mendorong transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan memanfaatkan kembali material yang sudah ada, mengurangi limbah, dan mengurangi dampak lingkungan dari ekstraksi bahan mentah. Sebagai arah dari kebijakan nasional menuju siklus ekonomi sirkular diharapkan dapat digunakan sebagai solusi terhadap krisis lingkungan, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh ekonomi linear yang diharapkan dampaknya berdampak pada efisiensi ekonomi dan penghematan biaya jangka panjang dengan mengurangi ketergantungan pada penggunaan bahan mentah (*virgin material*), mendorong industri baru dan menciptakan lapangan kerja hijau dalam sektor pengelolaan limbah dan teknologi bersih ramah lingkungan.

Dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi sirkular berkelanjutan, perlu adanya pengukuran secara kuantitatif terhadap tingkatan input material sirkular agar dampaknya dapat dianalisis dan ditingkatkan sehingga dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.

Sehingga diharapkan implementasi material sirkular memberikan manfaat nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Persentase indikator dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

Rumusnya :

$$\text{Tingkat Input Material Sirkular} = \frac{\text{Jumlah PRO-P yang menerapkan Prinsip Sirkular}}{\text{Total PRO-P yang dikoordinasikan}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga triwulan I 2025 nilai dari tingkat input material sirkualr sebesar 9,25 berdasarkan aktifitas kegiatan yang tealkh dilaksanakan selama triwulan ini. Adapun hasil penilaian kinerja dari IKU ini dapat di gambarkan oada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi Triwulan I	%Kinerja
IKU 2.1 Tingkat Input Material Sirkular	nilai	9,2%**	9,2%**	100%

**Nilai masih bersifat prediksi berdasarkan pengukuran activity yang dilaksanakan tahunan*

Pada triwulan I tahun 2025 pelaksanaan implementasi kebijakan material sirkular ini, telah dilaksanakan penyusunan pengumpulan data dan informasi melalui studi literatur, survei lapangan, dan konsultasi publik dengan para *stakeholder* sehingga dapat ditentukan bagaimana arah kerangka kebijakan secara menyeluruh, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Setelah itu, dilakukan analisis situasi dan identifikasi permasalahan utama yang ingin diselesaikan meliputi potensi dampak kebijakan, serta hambatan yang mungkin dihadapi dengan menyusun beberapa opsi atau alternatif solusi yang bisa diterapkan. Kegiatan yang tekah dilaksanakan dalam mendukung tercapainya target IKU ini antara lain:

- Harmonisasi regulasi dan standar nasional mengenai material sirkular,
- Penyusunan insentif fiskal dan nonfiskal bagi industri yang menerapkan prinsip sirkularitas;
- Peningkatan infrastruktur daur ulang dan logistik limbah,
- Penyediaan data material flow secara terpadu;
- Serta penyusunan roadmap dan indikator pemantauan penggunaan material sirkular secara nasional;
- pembentukan tim lintas kementerian untuk menyusun kerangka kebijakan nasional terkait material sirkular;
- serta rencana kerja bersama dalam bentuk pilot project di sektor prioritas seperti tekstil, konstruksi, elektronik, dan kemasan.

Ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang menerapkan pendekatan sistemik untuk meminimalkan penggunaan sumber daya, mendesain suatu produk agar memiliki daya guna selama mungkin, dan mengembalikan sisa proses produksi dan konsumsi ke dalam rantai nilai. Terdapat 3 arah kebijakan dan indikator utama Ekonomi Sirkular di Indonesia, antara lain:

1. Pengurangan penggunaan sumber daya dengan indikator Tingkat Input Material Sirkular. Dengan baseline target tahun 2023 sebesar 9%, target pada 2025 sebesar 9,2% dan pada 2029 sebesar 10%.
2. Perpanjangan daya guna produk dan material, dengan indikator Tingkat Daya Guna.
3. Peningkatan daur ulang dan pemanfaatan sisa produksi dan konsumsi, dengan indikator Tingkat Daur Ulang.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, fungsi kesekretariatan dalam mengampu IKU ini yaitu

- Sekretaris Kementerian mengawal indikator RPJMN 2025-2029 yang diampu oleh Kemenko Bidang Perekonomian, salah satunya terkait Tingkat Input Material Sirkular.
- Menyusun perencanaan kerja dan rencana aksi serta analisis mendalam terhadap sektor dan isu yang dikawal oleh Kemenko Perekonomian.
- Mendata kebijakan dan regulasi serta stakeholder yang terkait dengan Tingkat Input Material Sirkular.

Proyeksi triwulan I tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan I tahun 2023. Hal ini dikarenakan indikator kinerja utama Tingkat Input Material Sirkular merupakan indikator baru yang tidak ada di tahun sebelumnya. Akan tetapi, mengingat tingginya intensitas diskusi bersama dalam mengidentifikasi isu dan sinkronisasi kebijakan di triwulan I 2025 maka diprediksi Tingkat Input Material Sirkular dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

IKU 2.1 Tingkat Input Material Sirkular			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Melaksanakan koordinasi kebijakan antar Kementerian/Lembaga	Terlaksana	Telah melaksanakan koordinasi kebijakan antar Kementerian/Lembaga
2.	Identifikasi kebijakan tumpang tindih dalam penguatan <i>circular economy</i>	Terlaksana	Telah dilaksanakan identifikasi kebijakan tumpang tindih dalam penguatan <i>circular economy</i>

Upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:

1. Melaksanakan penyelarasan Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Perekonomian dalam Rencana Strategis 2025-2029 pada 9-10 Januari 2025.

2. Mengidentifikasi dan memetakan program-program prioritas Kemenko Perekonomian dalam rancangan awal RPJMN 2025-2029, salah satunya Tingkat Input Material Sirkular pada 20 Januari 2025.
3. Melaksanakan Diskusi atas hasil kajian mengenai faktor-faktor penggerak IKU Kemenko Perekonomian pada 22 Januari 2025..

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang TW I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Melaksanakan koordinasi dan rapat beberapa tema rapat dalam 1 kesempatan yang sama
2. Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
3. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan atau *workshop*
4. Pengumpulan dan *sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan TW I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Indikator terkait Tingkat Input Material Sirkular relatif masih baru di Kemenko Perekonomian, sehingga dalam identifikasi isu/permasalahan masih terbatas.
2. Adanya perubahan SOTK dan reorganisasi unit kerja sehingga terdapat perubahan dalam tugas fungsi dan kewenangan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dalam pembahasan identifikasi isu/permasalahan terkait dengan Tingkat Input Material Sirkular
2. Memperkuat kolaborasi dengan unit kerja dalam mengidentifikasi program kerja yang nantinya akan berkaitan dengan Tingkat Input material Sirkular.

2.2 Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan

Latar Belakang

Berdasarkan RPJMN th. 2025-2029, Kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan merupakan Program Prioritas Nasional yang ke-4. Kesetaraan gender laki-laki dan perempuan dan penguatan peran perempuan merupakan salah satu indikator pada PN ke-4 yang disasar melalui peningkatan kesetaraan gender, kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang. Salah satu diantaranya diukur melalui indikator pengeluaran perkapita laki – laki dan perempuan. Indikator ini mengukur kesenjangan rata-rata pengeluaran per kapita antara penduduk laki – laki dan perempuan sebagai salah satu parameter disparitas kesejahteraan ekonomi berdasarkan gender. Adapun isu/permasalahan yang menjadi atensi awal dari IKU ini adalah terkait:

1. Partisipasi ketenagakerjaan masih rendah
2. Perekonomian masih didominasi laki-laki
3. Kesenjangan upah
4. Kewirausahaan perempuan masih rendah

5. Literasi digital perempuan lebih rendah
6. Inklusi dan literasi keuangan p > l

Selanjutnya, isu/permasalahan tersebut diolah menjadi dokumen keluaran yang meliputi:

1. Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
2. Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan;
3. Kertas Kerja Kebijakan;
4. Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Sehingga didapatkan hasil akhir yaitu:

1. Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terkait pengeluaran perkapita laki-laki dan Perempuan
2. Rekomendasi kebijakan terkait peran dan efektifitas perempuan untuk memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I tahun 2025, kegiatan utama yang difokuskan pada pengumpulan data yang terpilah menurut jenis kelamin, baik melalui survei, data statistik sosial ekonomi, maupun sumber administratif lainnya. Pengumpulan data ini mencakup partisipasi laki-laki dan perempuan pada instrument kegiatan ekonomi seperti TPAK, literasi digital, inklusi dan literasi keuangan, dan instrumen lainnya.

Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan hingga Triwulan I 2025, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Triwulan I	%Kinerja
IKU 2.2 Pengeluaran Perkapita Laki – Laki dan Perempuan	Rupiah	Lk : 16.736 Pr : 9.579	Lk : 16.736 Pr : 9.579	100%

**Nilai masih bersifat prediksi berdasarkan pengukuran activity yang dilaksanakan secara mandiri pada triwulan I*

Sesuai dengan RPJMN 2025-2029, Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan (PPLP) merupakan indikator yang diampu oleh Kemenko Perekonomian yang mendukung Prioritas Nasional ke-4 yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Indikator PPLP merupakan indikator ke-6 dalam Program Prioritas 04.19 Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan.

Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan (PPLP) merupakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan jenis kelamin kepala rumah tangga (L/P) yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*) dengan mempertimbangkan perbedaan harga antar daerah dan pembobotan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2023, capaian pengeluaran per kapita laki-laki sebesar Rp 16.736 ribu, sedangkan perempuan mencapai Rp 9.579 ribu. Sementara pada tahun 2025 tingkat

pengeluaran tersebut diharapkan dapat meningkat dengan target sebesar Rp 16.891 ribu (laki-laki) dan Rp 9.920 ribu (perempuan). Selanjutnya pada tahun 2029 ditargetkan mencapai Rp 17.899 ribu (laki-laki) dan Rp 10.603 ribu (perempuan). Peningkatan pengeluaran per kapita baik laki-laki maupun perempuan diharapkan meningkat dari tahun 2025 hingga 2029.

Pemetaan isu Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan memperlihatkan tantangan yang kompleks. Rendahnya partisipasi perempuan dalam ketenagakerjaan, dominasi laki-laki dalam struktur ekonomi, kesenjangan upah, minimnya kewirausahaan perempuan, serta ketertinggalan dalam literasi digital dan inklusi keuangan menjadi hambatan utama yang harus diatasi. Fakta bahwa literasi dan inklusi keuangan perempuan masih lebih rendah dari laki-laki juga mempertegas pentingnya pendekatan multidimensional dalam pengarusutamaan gender. Fungsi kesekretariatan dalam mengampu IKU ini yaitu:

- Sekretariat mengawal indikator RPJMN 2025-2029 yang diampu oleh Kemenko Bidang Perekonomian, salah satunya terkait Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan.
- Menyusun perencanaan kerja dan rencana aksi serta analisis mendalam terhadap sektor dan isu yang dikawal oleh Kemenko Perekonomian.
- Mendata kebijakan dan regulasi serta stakeholder yang terkait dengan Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan.

Proyeksi triwulan I tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan I tahun 2023. Hal ini dikarenakan indikator kinerja utama Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan merupakan indikator baru yang tidak ada di tahun sebelumnya. Akan tetapi, mengingat tingginya intensitas diskusi bersama dalam mengidentifikasi isu dan sinkronisasi kebijakan di triwulan I 2025 maka diprediksi Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

IKU 2.2 Pengeluaran Perkapita Laki – Laki dan Perempuan			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Koordinasi <i>crosscutting</i> antar Kementerian/Lembaga untuk Harmonisasi Kebijakan	Terlaksana	Terlaksananya Koordinasi <i>crosscutting</i> antar Kementerian/Lembaga untuk Harmonisasi Kebijakan
2.	Identifikasi kesengsaraan kebijakan dan data pengeluaran gender di	Terlaksana	Terlaksananya identifikasi kesengsaraan kebijakan dan data pengeluaran gender di tingkat nasional dan daerah

	tingkat nasional dan daerah		
--	-----------------------------	--	--

Upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu :

1. Melaksanakan penyelarasan Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Perekonomian dalam Rencana Strategis 2025-2029 pada 9-10 Januari 2025.
2. Mengidentifikasi dan memetakan program-program prioritas Kemenko Perekonomian dalam rancangan awal RPJMN 2025-2029, salah satunya Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan pada 17 Januari 2025.
3. Melaksanakan Diskusi atas hasil kajian mengenai faktor-faktor penggerak IKU Kemenko Perekonomian pada 22 Januari 2025..

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang TW I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Melaksanakan koordinasi dan rapat beberapa tema rapat dalam 1 kesempatan yang sama
2. Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
3. Pengumpulan dan *sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan TW I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Indikator terkait Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan relatif masih baru di Biro MKKS, sehingga dalam identifikasi isu/permasalahan masih terbatas.
2. Adanya perubahan SOTK dan reorganisasi unit kerja sehingga terdapat perubahan dalam tugas fungsi dan kewenangan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada TW I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Perlunya koordinasi dengan BPS dalam pembahasan penghitungan target indikator Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan
2. Perlunya kolaborasi dengan unit kerja dalam mengidentifikasi program kerja yang nantinya akan berkaitan dengan Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan

Pencapaian Sasaran Program 3 : Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efisien ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Dimanfaatkan

3.1 Persentase Latar Belakang

Rekomendasi

Kebijakan

Lintas

Sektoral yang

Dimanfaatkan

Indikator ini mengukur efektivitas koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian/Lembaga dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan lintas sektoral yang dilaksanakan melalui forum koordinasi, fasilitasi, dan sinergisitas antar Kementerian/Lembaga. Indikator Utama ini menekankan *outcome*, tingkat penerimaan dan pemanfaatan konkret dari hasil koordinasi yang telah dilaksanakan.

Adapun rekomendasi kebijakan lintas sektoral yang diampu oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2025 adalah :

1. Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi
Kegiatan ini mencerminkan peran dari Kemenko Ekon dalam memastikan kebijakan ekonomi nasional yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara tepat waktu, terintegritas, dan berdampak. Melalui koordinasi ini diharapkan kebijakan yang dihasilkan tidak terjadi duplikasi kebijakan, stagnasi pelaksanaan, atau konflik kepentingan antar Kementerian/Lembaga
2. Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja
Sebagai amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja, Sekretariat Kemenko Ekon berperan dalam mengkoordinasikan kebijakan lintas sektoral yang mendukung penciptaan iklim usaha yang sehat, investasi yang kompetitif dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.
3. Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi
Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga mencerminkan keadilan dan distribusi yang merata antardaerah, antarwilayah, serta kelompok masyarakat.

Rumus Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Ditindaklanjuti:

$$\% \text{ R. Kebijakan Lintas Sektor} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang terselesaikan}} \times 100$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I tahun 2025, Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti telah terealisasi sebesar 25%. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan yaitu pada proses penyusunan rekomendasi kebijakan lintas sektoral hingga Triwulan I 2025, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi Triwulan I	%Kinerja
IKU 3.1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Dimanfaatkan	Persen	25%	25%	100%

**Hasil Realisasi dan %Kinerja berdasarkan pengukuran activity, karena nilai persentase baru bisa diketahui pada akhir tahun.*

Berdasarkan kegiatan yang menunjang langsung tercapainya tujuan target yang diharapkan, kegiatan rencana aksi pada Triwulan I Tahun 2025 telah tercapai sebesar 20%. Persentase rekomendasi kebijakan lintas sektor yang ditindaklanjuti baru dapat diketahui nilainya pada akhir tahun.

Kebijakan lintas sektor yang aktivitasnya telah dilaksanakan hingga Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Syariah

Ekonomi dan keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, baik di tingkat global maupun nasional. Indonesia turut mengalami pertumbuhan pesat dalam sektor ekonomi dan keuangan syariah. Berbagai pencapaian di level internasional menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam industri ini. Pada tahun 2023 dan 2024, Indonesia berhasil meraih peringkat pertama dalam Global Muslim Travel Index, yang menunjukkan kekuatannya sebagai destinasi utama wisata halal global. Selain itu, Indonesia juga menduduki posisi ketiga dalam sejumlah indikator ekonomi syariah global.

Selain keuangan syariah, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di Industri halal, yang mencakup makanan, minuman, kosmetik, farmasi, dan pariwisata, menjadi pilar penting ekonomi syariah dengan nilai pasar global USD 2,4 triliun pada 2024. Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP Nomor 42 Tahun 2024 telah memperkuat sertifikasi halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), tetapi keterbatasan auditor halal, biaya sertifikasi bagi UMKM, dan kurangnya standar halal internasional menghambat daya saing.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, dalam pencapaian proses penyusunan rekomendasi kebijakan terkait dengan Ekonomi Syariah, disampaikan sebagai berikut:

- Sekretariat mengawal kolaborasi antara BPJPH dengan Kementerian Agama, dengan pemisahan umum di Kementerian Agama dan peraturan Khusus di BPJPH.
- Mengawal pembahasan rancangan Per-BPJPH tentang Tata Niaga Impor Produk Halal sebagai dasar penyusunan Surat Kesesuaian Kehalalan (SKK) yang perlu ditindaklanjuti lebih detail kembali dalam ketentuan regulasi kehalalan produk impor yang masuk ke Indonesia.
- Monitoring implementasi Roadmap Pengembangan Dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 sebagai tindak lanjut kejelasan wewenang tugas fungsi ekonomi syariah yang di-lead oleh

KNEKS dan OJK untuk diikoordinasikan isu dan program kerja dengan kementerian/lembaga terkait.

2. Indonesia National Single Window (INSW)

Indonesia National Single Window merupakan sistem eletronik nasional yang mengintegrasikan proses perizinan ekspor, impor, dan logistik antar instansi pemerintah dalam satu platform digital. Tujuan utama INSW adalah meningkatkan sinergi dan kolaborasi kementerian/lembaga dalam memberikan efisiensi layanan publik yang terintegrasi serta terdigitalisasi di bidang ekspor, impor, dan logistik.

Hingga triwulan I Tahun 2025, telah dilaksanakan pembahasan Unit Layanan Single Window (ULSW) Kementerian Pertanian. ULSW Kementan telah dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementan Nomor 887 tahun 2024. Selanjutnya akan segera dibentuk *Business Continuity Management System (BCMs)* Kementerian Pertanian dengan memperhatikan BCMs INSW yang telah disusun. Terkait dengan isu strategis SIMIRAH dengan mengadopsi aplikasi SIMBARA, akan diikoordinasikan lebih lanjut oleh LNSW. Kementerian Pertanian juga menyampaikan kesiapan dukungan data dan informasi dashboard komoditas agro sesuai dengan arahan pada Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW Semester II Tahun 2024.

Proyeksi triwulan I tahun 2025 tidak jauh berbeda apabila dibandingkan dengan realisasi triwulan I tahun 2024. Hal ini dikarenakan indikator penyelesaian rekomendasi lintas sektor dapat dilaksanakan dengan baik pada triwulan I. Identifikasi isu dan permasalahan, serta sinkronisasi dan koordinasi kebijakan lintas sektor telah dilaksanakan dan diprediksi penyelesaian rekomendasi kebijakan lintas sektor dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan.

3. Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja

Pada TW I 2025, telah dilakukan dukungan terhadap proses penyusunan peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP PBBR).

Proses penyusunan PP PBBR dimulai melalui permohonan penetapan oleh Presiden yang disampaikan melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PH.2.1/270/M.EKON/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024. Selanjutnya dilakukan proses paraf persetujuan naskah RPP PBBR oleh menteri terkait, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-18/M/D-1/HK.02.02/01/2025 tanggal 10 Januari 2025.

Pada TW I Tahun 2025 juga telah dilaksanakan rapat finalisasi Lampiran PP PBBR, dengan mengakomodasi masukan dari berbagai KL. Selain itu, diselenggarakan fasilitasi terhadap penyusunan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Revisi tersebut masih dalam tahap pembahasan Rapat Antar Kementerian/Antar Nonkementerian (PAK).

Selain itu, dilakukan pendampingan **Judicial Review** atas Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, baik di Mahkamah Konstitusi

maupun Mahkamah Agung, termasuk dalam penyusunan jawaban Presiden. Perkara yang ditangani antara lain:

1. 147/PUU-XXI/2024, uji materiil klaster Lingkungan Hidup.
2. 181/PUU-XXI/2024, uji materiil klaster Lingkungan Hidup.
3. 9P/HUM/2025, uji materiil Permenko tentang Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
4. 12P/HUM/2025, uji materiil Permenko tentang Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

IKU 2.1 Tingkat Input Material Sirkular			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian pada Lintas Sektoral dalam Bentuk Naskah Kedinasan dan/atau Karya Tulis Ilmiah	Ditunda dengan Perubahan	Akan dilaksanakan pada TW Berikutnya

Upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu :

- Menyusun bahan Ekonomi Syariah Indonesia dalam acara Seminar the Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) pada 18 Maret 2025.
- Menjadi narasumber dalam Talkshow Economic Challenges Special Ramadan AmCham Indonesia Breakfasting Forum: Strategic Collaboration for Effective Halal Certification Implementation yang diselenggarakan oleh Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) dan Metro TV pada 25 Maret 2025.
- Pelaksanaan rapat finalisasi lampiran RPP PBBR dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian ESDM, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BPKM
- Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan Revisi PP No. 41/2021 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan Kementerian Sekretariat negara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dan BP Batam dalam rangka koordinasi penyusunan peraturan pelaksanaan UUCK yang diprakarsai oleh Kemenko Perekonomian
- Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan revisi perpres tentang Bidang Usaha penanaman modal dengan Kementerian Sekretariat negara dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BPKM

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang TW I tahun 202 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya :

- Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting
- Pengumpulan dan *Sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai
- Dilakukan kolaborasi pembiayaan dengan stakeholder terkait

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada TW selanjutnya

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Kebijakan Cipta Kerja mencakup berbagai sektor, sehingga melibatkan banyak kementerian/lembaga. Hal ini menuntut koordinasi lintas kementerian/lembaga yang intensif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Proses ini memerlukan waktu cukup panjang agar pembahasan peraturan dapat dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif.
- Uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan dapat diajukan kapan saja oleh pihak yang berkepentingan, tanpa batasan waktu. Oleh sebab itu, advokasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga konsistensi kebijakan Cipta Kerja.
- Masih adanya egosektoral di masing-masing unit kerja terkait penerapan kebijakan ekonomi syariah.
- Adanya perubahan SOTK di setiap kementerian/lembaga mengakibatkan perubahan tugas, fungsi, dan kewenangan sehingga perlu ada pembaharuan kelembagaan INSW.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2024, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Memperkuat kolaborasi dengan unit kerja di tiap kementerian/lembaga terkait.
- Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait secara simultan untuk mempercepat proses pembahasan dan penyelesaian.
- Meningkatkan sinergi lintas kementerian/lembaga dalam rangka advokasi *Judicial Review* atas Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
- Menyediakan dukungan anggaran bagi pelaksanaan rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait penyusunan peraturan perundang-undangan serta advokasi *Judicial Review* Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

Pencapaian Sasaran Program 4 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan Standar Nasional ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

4.1 Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Latar Belakang

Persentase penyelesaian dokumen penyelenggaraan tata kelola pemerintah merupakan ukuran yang menggambarkan capaian atas penyelesaian dokumen penyelenggaraan tata kelola di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penyelesaian Dokumen Tata kelola merupakan hasil dari proses bisnis sekretariat yang berfokus pada empat bidang utama yakni perencanaan, hukum dan organisasi, umum dan sumber daya manusia dan komunikasi, layanan informasi dan persidangan. Seluruh Dokumen Tata Kelola yang dihasilkan harus mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh instansi pembina. Adapun kriteria yang menunjukkan bahwa dokumen yang dihasilkan telah sesuai dengan standar apabila (1) Format dan Subtansi telah sesuai dengan acuan yang digunakan, (2) Dokumen dihasilkan tepat waktu, (3) Dokumen yang mendapatkan sedikit perbaikan dari instansi pembina.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I tahun 2025, nilai Reformasi Birokrasi yang telah terealisasi sebesar 25% atau mencapai 100% dari target TW I 2025 sebesar 25% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi Triwulan I	%Kinerja
IKU 4.1 Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah	Persen	25%*	25%*	100%*

**Hasil Realisasi dan %Kinerja TW I berdasarkan pengukuran activity,*

Sekretariat berfungsi menyelenggarakan penyelesaian dokumen pemerintahan di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian, yang berfokus pada 4 komponen utama yakni perencanaan kinerja dan kerja sama; hukum dan organisasi; umum dan sumber daya manusia; dan komunikasi layanan informasi dan persidangan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

IKU 4.1 Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan

			(Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Penyusunan, penetapan dan sirkulasi dokumen perencanaan anggaran kinerja TW I	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Kinerja Anggaran SMART (TW I) • Revisi DIPA atas Inpres No. 1/2025 atas Efisiensi Belanja K/L • Revisi POK unit kerja TA 2025 • Dokumen Reviu Baseline TA 2026 • Dokumen Capaian RO TW I 2025 melalui Emonev dan ERekon • Dokumen Perjanjian Kinerja 2025 • Dokumen hasil reviu penyusunan IKU Kinerja tahun 2025 • Dokumen rapat koordinasi <i>coaching clinic</i> bersama seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko Perekonomian • Dokumen Laporan Kinerja TW I 2025 • Dokumen Matriks Evaluasi AKIP 2024 • Laporan layanan penyediaan dan pengolahan data dan sistem informasi • Dokumen draft penyusunan standar kebijakan
2.	Penyusunan, penetapan, dan sirkulasi dokumen hukum dan organisasi TW I	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Matriks evaluasi jabatan dan rancangan permeko kelas jabatan • Dokumen Permenko No.14/2022 tentang proses bisnis Kemenko Ekonomi dan Permenko No. 1/2025 tentang Mekanisme kerja di lingkungan EKON
3.	Penyusunan, penetapan dan sirkulasi dokumen administrasi umum dan manajemen SDM TW I	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen matriks Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana serta simplifikasi Informasi Jabatan

			<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Penyesuaian kebutuhan/formasi Jabatan Fungsional Kesehatan • Dokumen laporan keuangan <i>Unaudited</i> 2024 yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan yang di ttd Inspektur Kemenko Ekon • Dokumen kebutuhan hasil seleksi CPNS dan PPPK tahun 2025 dengan jumlah masing – masing 137 orang dan 70 orang • Dokumen laporan pengawasan dan pengendalian barang
4	Penyusunan, penetapan, dan sirkulasi dokumen komunikasi dan informasi publik, persidangan, dan naskah Menteri TW I	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen risalah rapat koordinasi dan naskah menteri

Selain pelaksanaan rencana aksi diatas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- Mengatur penyelesaian atas 128 permohonan penyelesaian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan (analisis dan harmonisasi)
- Melaksanakan rapat koordinasi beberapa unit kerja dalam 1 kesempatan yang sama
- Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan atau *workshop*
- Pengumpulan dan *sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai (Google Drive)
- Melakukan revisi DIPA dengan tujuan pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan strategis dan/atau prioritas pada Triwulan I TA. 2025.
- Mengidentifikasi isu strategis, tantangan, dan program kerja yang dapat dikawal oleh Unit Kedeputan dalam penyusunan Renstra K/L 2025-2029.
- Penyelesaian revisi POK sesuai yang diusulkan oleh unit kerja pada Triwulan I TA 2025.
- Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi yang lancar dan feedback yang baik antara Sekretariat dengan unit-unit kerja di lingkungan Kemenko Perekonomian
- Pelaksanaan penyusunan matriks tindaklanjut atas penyusunan indikator kinerja tahun 2025
- Pengumpulan dan *sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai
- Melakukan penyediaan layanan internet;

- Melakukan penyediaan langganan data eksternal berupa layanan data Bloomberg dan CEIC dengan mekanisme permintaan data reguler dan sharing data melalui koneksi jarak jauh;
- Melakukan penyediaan layanan *video meeting/conference/webinar*;
- Melakukan penyediaan layanan email ekon;
- Melakukan penyediaan layanan pusat data termasuk dengan pusat data nasional;
- Penyediaan layanan *hosting* dan domain manajemen aplikasi ekon.go.id;
- Melaksanakan penyediaan data BPS tarif 0 rupiah melalui aplikasi silastik;
- Melakukan pembangunan ruang NOC (*Network Operation Control*);
- Melakukan penyediaan perangkat keamanan IT berupa *UTM Firewall* dan *Switch Distribution*;
- Melakukan migrasi database untuk beberapa aplikasi Kementerian;
- Melakukan peningkatan PHP pada aplikasi kepegawaian;
- Melakukan penambahan fitur pada aplikasi kepegawaian;
- Melakukan *maintenance* pada aplikasi cuti;
- Melakukan perbaikan pada *website* Kedeputan 4;
- Melakukan penambahan fitur pada aplikasi presensi;
- Melakukan pembangunan *website* informasi TECHX-PROGRAMME.
- Melakukan pembaruan data eksisting Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan pada aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK), serta menyelesaikan perhitungan kebutuhan JF Kesehatan melalui aplikasi Perencanaan Kebutuhan (Renbut) pada tanggal 7 Maret 2025. Telah diperoleh Berita Acara Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kesehatan pada tanggal 10 Maret 2025 dan Rekomendasi Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan dari Kemenko Perekonomian pada tanggal 12 Maret 2025.
- Melaksanakan bimbingan dan konsultasi SDM Kearsipan terkait perhitungan kebutuhan.
- Menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Arsiparis bagi kementerian/lembaga yang baru dibentuk, dipisah, digabung, atau diubah nomenklaturnya oleh Kabinet Merah Putih bersama ANRI, yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 20 Februari 2025.
- Mengirimkan Nota Dinas Nomor OT.04/33/SES.M.EKON/02/2025 tanggal 5 Februari 2025 mengenai penyampaian Pedoman Pelaksanaan Mekanisme Kerja dengan Pola Organisasi Dua Level Struktur
- Menyusun format baku Surat Keputusan (SK) Pokja dan surat tugas penugasan individu.
- Melaksanakan diskusi interaktif terkait pelaksanaan mekanisme kerja bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi ESDM pada tanggal 28 Februari 2025, melalui undangan dari Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi ESDM Nomor: OT.04.04/8/D.IV.M.EKON.1/02/2025 tentang penyampaian pedoman pelaksanaan mekanisme kerja dengan pola organisasi dua level struktur.
- Memberikan konsultasi baik secara formal maupun informal melalui komunikasi langsung (*direct*) ataupun melalui media telekomunikasi.
- Menyelesaikan permasalahan terkait layanan SDM dengan mengedepankan ketentuan hukum dan prinsip keadilan.
- Melaksanakan rekonsiliasi eksternal untuk periode Semester II Tahun Anggaran 2024 melalui Aplikasi MONSAKTI.
- Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya *Unaudited* Tahun Anggaran 2024.
- Menghadiri rapat *Entry Meeting* pemeriksaan BPK.

- Melakukan koordinasi dengan pihak Inspektorat dalam rangka reviu Laporan Keuangan.
- Menyampaikan Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun Anggaran 2024 ke Direktorat APK Kementerian Keuangan.
- Memberikan layanan manajemen permintaan dokumen dalam rangka pemeriksaan oleh BPK
- Melakukan konfigurasi ulang aplikasi SRIKANDI secara menyeluruh karena adanya perubahan struktur organisasi dan perpindahan tugas pegawai internal Kemenko Bidang Perekonomian

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya berupa penghematan anggaran melalui optimalisasi ruang rapat sebagai sarana pendukung koordinasi

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Terlambatnya waktu pengumpulan laporan kinerja TW I
- Sinkronisasi pagu hasil revisi DIPA ke Sistem Krisna- Renja khusus pada program koordinasi kebijakan tidak dapat dilakukan disebabkan perubahan nomenklatur yang tidak tepat di DIPA.
- Renstra Kemenko Bidang Perekonomian 2025-2029 belum ditetapkan sehingga belum bisa menentukan target kinerja di penyusunan rancangan awal Renja 2026.
- Sehubungan dengan SOTK baru Kemenko Bidang Perekonomian, Indikator Kinerja Utama masing-masing eselon I akan berubah dari Renja 2025 yang telah ditetapkan
- Belum dikeluarkannya kebijakan pelaksanaan RB tahun 2025 oleh Kemenpan RB
- Proses pengelolaan kebutuhan formasi jabatan fungsional tidak dapat diprediksi waktu penetapannya
- Terdapat dinamika dalam proses harmonisasi perundangan
- Kurangnya koordinasi antar unit kerja dalam menyusun konten dan strategi komunikasi mengingat jenis isu yang ditangani unit kerja sangat beragam
- Kendala pada sistem aplikasi SRIKANDI yang terjadi secara Nasional
- Masih terdapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang belum tertib dalam mencatat perencanaan pengadaan melalui aplikasi SiRUP.
- Masih diperlukan pendampingan intensif kepada Staf Pengelola Keuangan dalam menyelesaikan proses pencatatan pengadaan non-e-tendering dan non-e-purchasing.
- Belum ada PPK yang bersedia melakukan transaksi pengadaan barang/jasa melalui *platform digital* Toko Daring.
-

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Meningkatkan kembali koordinasi terkait waktu pengumpulan Lapkin TW I
- Berkoordinasi secara bilateral bersama unit kerja eselon II yang terkait dengan kebijakan hilirasi dan investasi dengan Direktorat PEMPMP Bappenas dan Direktur Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi

- Menginventarisasi kebutuhan penyesuaian dengan Rancangan Renstra Kemenko Perekonomian 2025-2029
- Penyelenggaraan Koordinasi dengan Unit Kerja dalam penyusunan Kerangka Kelembagaan, Kerangka Regulasi
- Berkoordinasi dengan Unit Kerja untuk pengusulan TOR dan RAB terkait rencana Rincian Output yang akan dihasilkan pada TA 2026.
- Disusun Upaya atau rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan tercapai
- Penguatan koordinasi dalam pembahasan substansi
- Meningkatkan koordinasi antar unit kerja dalam menyusun konten dan strategi komunikasi mengingat jenis isu yang ditangani unit kerja
- Melaksanakan koordinasi secara intens dengan Tim SRIKANDI Pusat
- Melaksanakan koordinasi internal bersama Staf Pengelola Keuangan (SPK) pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna mencegah terjadinya kesalahan pencatatan transaksi BMN yang dapat menghambat proses penyusunan laporan-laporan *mandatory*.
- Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap transaksi Belanja Pemeliharaan untuk menghindari potensi reklasifikasi pengakuan Aset dari transaksi tersebut karena tidak sesuai dengan proses pengakuan Aset yang semestinya
- Memberikan pembekalan kepada SPK dan PPK terkait Sistem Informasi PBJ yang berhubungan dengan proses transaksional melalui kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, atau *coaching clinic*.
- Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap pencatatan perencanaan hingga realisasi pengadaan barang/jasa di setiap unit kerja.

5

Sasaran Program 5 : Terselenggaranya Layanan Prima yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 5 : Terselenggaranya Layanan Prima yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat

5.1 Indeks

Kepuasan

Layanan

Sekretariat

Latar Belakang

Layanan Sekretariat adalah layanan yang diberikan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian kepada Kedeputan untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. **Sekretariat Kemenko Perekonomian juga menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pemberian dukungan dalam :**

1. Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Perekonomian
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administratif meliputi ketatausahaan, SDM, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, humas, arsip
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
5. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
6. Pengelolaan data dan informasi
7. Pelaksanaan fungsi lainnya

Indikator kepuasan layanan Sekretariat mengukur tentang tingkat kepuasan layanan koordinasi dan dukungan yang diberikan oleh Sekretariat kepada Kedeputian sesuai dengan tugas dan fungsi dari Sekretaris Kemenko Perekonomian. Penilaian terhadap layanan ini didasarkan pada 5 (lima) aspek kualitas pelayanan yaitu :

1. Aspek Ketanggapan dalam layanan (*Responsiveness*);

Menggambarkan kesiapan dan kecepatan unit kerja dalam merespons permintaan, keluhan atau kebutuhan layanan

2. Aspek Keandalan dalam layanan (*Reability*);

Mengukur sejauh mana layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur atau standar layanan

3. Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (*Tangible*);

Menilai ketersediaan dan kualitas fisik/fasilitas, serta tampilan lingkungan kerja yang mendukung layanan

4. Aspek Kepastian dalam Layanan (*Assurance*);

Mengukur kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan, serta tingkat kepercayaan dan rasa aman

5. Aspek Sikap dalam Layanan (*Emphaty*)

Menunjukkan perhatian dan kepedulian secara personal dan manusiawi pada layanan yang diberikan

Seluruh aspek kepuasan ini dirata – rata dan diukur ke dalam indeks kepuasan layanan yang terdiri dari 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

1. Sangat Tidak Puas
2. Tidak Puas
3. Puas
4. Sangat Puas

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I tahun 2025, Nilai Indeks Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama adalah Indeks 3.53 atau Sangat Memuaskan, dengan ringkasan table TW I sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi Triwulan I	%Kinerja
IKU 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Kemenko Perekonomian	Indeks	3 dari 4	3.53	117,66%

Survei Kepuasan Layanan Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian di TW I telah dilaksanakan pada bulan April 2025. Pada triwulan ini, nilai indeks melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 117,66%. Ini merupakan hal yang perlu dipertahankan untuk triwulan selanjutnya, sehingga dapat mendukung penilaian indeks di akhir tahun 2025.

Pelaksanaan survei kepuasan layanan Sekretariat dilakukan secara online melalui tautan yang disebarakan kepada seluruh unit kerja. Pelaksanaan survei ini dilaksanakan pertriwulan atau 4 kali setahun. Pengukuran survei bertujuan untuk

mengukur realisasi layanan Sekretariat yang diukur melalui 5 (lima) aspek. Adapun aspek-aspek tersebut meliputi :

(1) Ketanggapan pelayanan; (2) Keandalan pelayanan; (3) Sarana dan prasarana fisik; (4) Kepastian pelayanan; dan (5) Sikap dalam pelayanan

Indeks kepuasan layanan Sekretariat diperoleh dari total seluruh layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Layanan Hukum dan Organisasi, Layanan Umum dan Sumber Daya Manusia, dan Layanan Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan, yaitu mengevaluasi tingkat kepuasan dari layanan yang diberikan kepada seluruh unit-unit kerja di lingkungan Kemenko Perekonomian dalam mendukung kemajuan pelaksanaan kegiatan-kegiatan unit kerja sehingga nilai indeks ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas layanan Biro Perencanaan dimasa depan pada area **Responsive, Reability, Tangible, Assurance, dan Emphaty**.

Pelaksanaan survey dilakukan pada link berikut www.bit.ly/LayananSekre2025 Hasil nilai Layanan Sekretariat triwulan I disetiap layanan yang diberikan dapat dilihat pada table berikut :

Indikator	Layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Layanan Hukum dan Organisasi	Layanan Komunikasi, Informasi dan Persidangan	Layanan Umum dan Sumber Daya Manusia	Total
Ketanggapan dalam Pelayanan (<i>Responsiveness</i>)	3.57	3.49	3.51	3.52	3.52
Keandalan dalam Pelayanan (<i>Reability</i>)	3.56	3.54	3.47	3.55	3.54
Sarana dan Prasarana Fisik (<i>Tangible</i>)	3.46	3.43	3.46	3.49	3.46
Kepastian dalam Pelayanan (<i>Assurance</i>)	3.59	3.51	3.53	3.55	3.55
Sikap dalam Pelayanan (<i>Emphaty</i>)	3.63	3.57	3.55	3.57	3.58
Rata-Rata	3.57	3.51	3.50	3.54	3.53

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Biro Sekretariat Kemenko Perekonomian untuk Triwulan I Tahun 2025 mencapai **3,53**, yang termasuk dalam kategori Sangat Puas. Capaian ini melampaui target triwulan yang ditetapkan, yaitu sebesar 3 atau kategori Puas, sehingga menunjukkan kinerja layanan yang melebihi ekspektasi. Layanan yang telah diberikan Sekretariat, meliputi :

Layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama :

1. Layanan koordinasi, asistensi, dan konsultasi terkait kinerja
2. Layanan penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi, dan manual iku di lingkup Menteri, Eselon I dan Eselon II
3. Layanan otomatisasi capaian kinerja di lingkungan kemenko ekon
4. Layanan penyesuaian target kinerja dan penyesuaian Rencana aksi pada tahun berjalan
5. Layanan penganggaran
6. Layanan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan
7. Layanan pemanfaatan media penyimpanan bersama
8. Layanan pemeliharaan seluruh website kantor
9. Layanan koordinasi FGD tata kelola kebijakan
10. Layanan koordinasi penggunaan ruang rapat

11. Layanan perbaikan dan peningkatan pengukuran kinerja yang didasarkan pada Hasil Evaluasi Mandiri serta Rekomendasi Evaluasi AKIP dari Kementerian PAN-RB.;

Layanan Hukum dan Organisasi :

1. Layanan sosialisasi hukum, legal drafting peraturan dan Keputusan, dan dokumentasi produk hukum
2. Layanan analisis hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja
3. Layanan pendampingan dalam rangka advokasi dan sosialisasi layanan instrumen penataan organisasi penataan system kerja melalui nota dinas, diskusi, rapat dan sebagainya
4. Layanan pendampingan penyusunan pokja/tim kerja kepada unit kerja
5. Layanan pendampingan penyusunan rencana aksi dan pemenuhan bukti dukung kepada unit kerja

Layanan Umum dan Sumber Daya Manusia

1. Layanan penyelenggaraan sosialisasi/workshop Bersama unit kerja, diantaranya :
 - a. Sosialisasi peraturan BKN No. 3 Tahun 2023
 - b. Sosialisasi Upaya optimalisasi kinerja perencanaan PBJ Tahun anggaran 2025
 - c. Sosialisasi permenko kehadiran kerja pegawai
 - d. Workshop instrumen audit system kearsipan internal
2. Layanan penghasilan pegawai dan pelaksanaan anggaran belanja pegawai
3. Layanan administrasi kepegawaian yang meliputi : Pengurusan kenaikan Gaji Berkala, Pengelolaan belanja pegawai, Pengurusan administrasi pension PNS, Layanan surat keterangan penghasilan, Fasilitasi cuti pegawai, Presensi online, Penyampaian bukti dukung absen, Konsultasi kepegawaian, pembukaan surat keterangan aktif bekerja, pembuatan ID card, pembuatan surat tugas belajar, penatausahaan penugasan protocol anggota polisi dan TNI, fasilitasi Taspen, Fasilitas BPJS Kesehatan, Fasilitasi jamkesmas dan Jamkestama, Pengurusan administrasi ujian dinas dan ujian penyetaraan kenaikan pangkat
4. Layanan penyelesaian tagihan dan pelaksanaan anggaran, dalam hal penyelesaian permasalahan perbendaharaan dan pertanggungjawaban anggaran
5. Layanan penyusunan atau pembaharuan SOP dan/atau aturan yang jelas terkait prosedur administrasi keuangan
6. Layanan optimalisasi ruang rapat]

Layanan Komunikasi, Layanan informasi dan Persidangan :

1. Layanan pemantauan dan penelaahan berita terkait isu dibidang ekonomi
2. Layanan perumusan dan pelaksanaan manajemen strategi komunikasi di lingkungan Kemenko Perekonomian
3. Layanan pengelolaan publikasi informasi dan kebijakan di bidang ekonomi
4. Layanan pengelolaan liputan dan dokumentasi kegiatan kemenko ekonomi
5. Layanan penerbitan siaran pers, keterangan pers, bantahan.tanggapan, artikel dan surat pembaca
6. Layanan koordinasi penyusunan naskah pimpinan meliputi penyiapan data dukung, penyusunan konsep dan harmonisasi naskah

7. Layanan koordinasi dan fasilitasi persidangan untuk penyelenggaraan rapat koordinasi yang mencakup penyiapan, pelaksanaan, penataan dan pengolahan digitalisasi dokumen serta pemnyusunan dan distribusi risalah rapat koordinasi Tingkat Menteri, rapat kelompok kerja, forum koordinasi, dan rapat pimpinan Kemenko Perekonomian

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

IKU 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Evaluasi hasil survey dan penyusunan rencana aksi peningkatan layanan	Terlaksana	Telah terlaksana Evaluasi hasil survey dan penyusunan rencana aksi peningkatan layanan
2.	Penyelenggaraan sosialisasi/workshop penguatan kapasitas SDM	Terlaksana	Telah terlaksana Penyelenggaraan sosialisasi/workshop penguatan kapasitas SDM
3.	Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Layanan TW I	Terlaksana	Telah terlaksana Penyelenggaraan sosialisasi/workshop penguatan kapasitas SDM
4.	Rekapitulasi terkait permohonan layanan dari unit kerja ke deputian pada TW I	Terlaksana	Telah terlaksana Rekapitulasi terkait permohonan layanan dari unit kerja ke deputian pada TW I
5.	Tindaklanjuti keluhan layanan dari unit kerja pada TW I	Terlaksana	Telah terlaksana Tindaklanjuti keluhan layanan dari unit kerja pada TW I

Selain pelaksanaan rencana aksi diatas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- Layanan pembuatan akun SAKTI, SIMASPATEN, Digit
- Penyelesaian verifikasi tagihan pertanggungjawaban anggaran melalui aplikasi SIVERA sebanyak 875 SPM
- Terlaksananya urusan keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan yang baik di lingkungan Kemenko Perekonomian yang dilakukan melalui pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan tata usaha pimpinan
- Layanan publikasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui Instagram dan website RB
- Layanan pendampingan terkait pelaksanaan indeks RB kepada unit kerja
- Layanan koordinasi dengan unit kerja terkait tentang instrument penataan organisasi seperti penyesuaian jabatan fungsional di bidang keuangan negara dan perhitungan kebutuhan jabatan fungsional Kesehatan
- Layanan diskusi interaktif terkait pelaksanaan mekanisme kerja dengan unit kerja
- Zoom Meeting mampu mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja di lingkungan Kementerian
- Perhatian pimpinan dan pejabat di lingkungan Kementerian koordinator Bidang Perekonomian yang mendorong terwujudnya layanan
- Ketanggapan dalam pelayanan dan kesesuaian informasi yang diberikan oleh setiap pegawai Biro Perencanaan mampu mendorong peningkatan kepuasan layanan yang diberikan
- Kecepatan dalam memberikan layanan yang dibutuhkan
- Kepastian layanan dalam menyelesaikan kendala/laporan yang diterima oleh unit kerja

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya berupa penghematan anggaran melalui optimalisasi ruang rapat sebagai sarana pendukung agenda RB.

- Penggunaan aplikasi via zoom untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam forum rapat sehingga memberikan ruang kepada seluruh peserta rapat untuk dapat mengikuti acara yang telah direncanakan.
- Penggunaan aplikasi penyimpanan berbasis Cloud, seperti Gdrive
- Penggunaan aplikasi dalam pelaporan dan pengukuran laporan kinerja
- Penggunaan aplikasi dalam menyampaikan kendala/laporan
- Evaluasi berkala yang dilakukan kepada para penyedia layanan kelompok substansi untuk meningkatkan layanan
- Koordinasi antar layanan untuk meningkatkan pemahaman dan keselarasan dalam menyelesaikan laporan

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Masih terdapat unit kerja yang terlambat dalam memberikan laporan kinerja dari waktu yang ditentukan
- Masih banyak pengguna ruang rapat yang tidak melakukan konfirmasi terkait pembatalan – pemesanan ruang rapat
- Masih terdapat arsip dosir pegawai tidak aktif yang perlu segera diserahkan kepada pengelola arsip karena sudah lebih dari dua

tahun, namun karena keterbatasan SDM Arsip di kelompok kerja Manajemen SDM maka sangat menyulitkan untuk proses administrasi serah terimanya

- Kurangnya sarana alat komunikasi berupa Handy Talky yang handal bagi personal protocol dan perangkat Menteri yang bertugas yang sesuai dengan kebutuhan di komunikasi lapangan
- Adanya efisiensi dan realokasi anggaran untuk pelatihan teknis yang mendukung pengembangan kompetensi para pegawai di bagian protocol dan tata usaha pimpinan dalam memenuhi 20 jam pelatihan/tahun
- Jumlah staf yang terbatas dibandingkan dengann beban kerja yang tinggi
- Adanya pembaharuan aplikasi pemesanan ruang rapat dari pihak ketiga sehingga proses pemesanan ruang rapat mengalami kendala saat dipesan oleh unit kerja
- Adanya kebijakan efisiensi sehingga pengadaan layanan sarana internal tertunda
- Belum optimalnya perencanaan publikasi konten di intagram dan website RB

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan ini agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Optimalisasi perencanaan publikasi konten di Instagram dan Website RB
- Meminta bantuan tenaga arsiparis dari pengelola arsip Kemenko Ekonomi untuk membantu proses administrasi serat terima dosir pegawai tidak aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Menyampaikan usulan kebutuhan pengadaan HT sesuai spesifikasi yang dibutuhkan di lapangan
- Merumuskan rencana kegiatan pelatihan di bidang layanan keprotokolan dan Tata Usaha Pimpinan
- Menyampaikan usulan kebutuhan jumlah personel pada unit bagian protocol dan tata usaha peimpinan berdasarkan alokasi CPNS 2025
- Melaksanakan proses pemesanan ruang rapat secara manual
- Melaksanakan pengadaan yang sudah terkontrak sebelum kebijakan efisiensi
- Memberikan ketegasan dan sosialisasi berkala agar setiap pihak yang terlibat dapat menyadari sepenuhnya tentang kepatuhan dalam waktu pengumpulan laporan

6

Sasaran Program 6 : Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik

Pencapaian Sasaran Program 6 : Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kemenko Perekonomian

6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan persentasi pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Eselon I ini

**Kemenko
Perekonomian**

merupakan agregat dari nilai persentase pelaksanaan RB di level Eselon II, didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum dan Organisasi, dan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, dan Unit Inspektorat.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I tahun 2025, nilai persentase pelaksanaan RB Sekretariat Kemenko Perekonomian yang telah terealisasi sebesar 25% atau mencapai 100% dari target TW I tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	%Kinerja
IKU 6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	%	25%*	25%*	100%*

***nilai bersifat penilaian mandiri, penilaian akhir dihasilkan diakhir tahun*

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dihitung berdasarkan jumlah agregat dari persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan RB Tematik di level kebiroan dibandingkan dengan jumlah unit Biro yang melaksanakan seluruh rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Hingga Triwulan I tahun 2025, aktivitas kegiatan yang dapat mendorong tinggi tercapainya IKU Pelaksanaan RB Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama ini adalah :

- Telah mengajukan rencana aksi RB General di Biro MKKS sebagai tindak lanjut dari rapat finalisasi penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi 2025 di lingkungan Kemenko Perekonomian pada undangan rapat Biro Hukum dan Organisasi dengan No. OT.05/58/SET.M.EKON.2/07/2025
- Telah melaksanakan rapat penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi, dan manual IKU di Biro MKKS dengan melibatkan seluruh kelompok substansi di lingkup Biro MKKS. Kemudian hasil penyusunan tersebut telah disahkan pada acara UND Nomor AK/333/SES.M.EKON/05/2025 pengesahan Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang dilaksanakan Jumat, 2025 di Gedung Ali Wardhana yang telah diikuti oleh seluruh Eselon I dan II, termasuk Kepala Biro MKKS



- Berdasarkan Nota Dinas Nomor. AK.03.01/180/SET.M.EKON.1/07/2025 tentang permintaan penyusunan Narasi Kinerja Triwulan I tahun 2025. Biro MKKS telah melaksanakan penyusunan laporan kinerja tersebut di sertai dengan Bukti dukung ke dalam website <https://kinerja.ekon.go.id>
- Biro MKKS telah Menyusun Rencana Kerja (Renja) ditahun 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.594.188.000. Indikator kinerja kegiatan (IKK) yang menjadi kawalan utama di tahun ini adalah : (1) Nilai AKIP Kementerian; (2) Indeks SPBE; (3) Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional; (4) Indeks Kepuasan Layanan Biro MKKS; dan (5) Persentase rekomendasi kebijakan lintas sectoral yang ditindaklanjuti. Rencana kerja ini ditetapkan oleh Sekretaris Kemenko Ekon pada tangga 7 Januari 2025
- Optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Kemenko Ekon merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola kearsipan elektronik yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Aplikasi ini berfungsi sebagai platform terintegrasi untuk pengelolaan surat menyurat dan arsip dinamis secara digital, mulai dari pencatatan, disposisi, hingga penyimpanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Selama TW I Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kemenko Perekonomian telah memaksimalkan penggunaan SRIKANDI pada website <https://srikandi.arsip.go.id>



- Rapat koordinasi Tingkat eselon 1 dan Menteri di lingkungan Kemenko Perekonomian, terkait pertumbuhan ekonomi Q2 2025, stimulus dan Quick Win penyerapan belanja untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi 5,2%
- Berdasarkan Nota Dinas Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Nomor KU.04.01/395/SET.M.EKON.4/07/2025 tentang realisasi anggaran Biro

Umum dan Sumber Daya Manusia dinyatakan bahwa penyerapan per 30 maret 2025 untuk Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama adalah 20,2%.

Kesimpulan :

Triwulan I tahun 2025, nilai mandiri berdasarkan aktivitas kegiatan yang telah dilaksanakan untuk Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama adalah 25%

Hingga Triwulan I tahun 2025, aktivitas kegiatan yang dapat mendorong tinggi tercapainya IKU Pelaksanaan RB Biro Hukum dan Organisasi adalah :

- Pemenuhan bukti dukung rencana aksi RB tertunda karena adanya perubahan kebijakan pelaksanaan RB dari Kementerian PANRB, sehingga pemenuhan bukti dukung belum dapat dilakukan pada tw I.
- Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU tertunda dan direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan II.
- Penyusunan laporan kinerja triwulanan telah terlaksana dengan penyusunan narasi kinerja beserta bukti dukung triwulan I oleh Biro Hukum dan Organisasi.
- Penyusunan Renja 2026 tertunda karena Renja 2026 akan disusun sesuai dengan Nota Dinas permintaan dari koordinator.
- Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI telah terlaksana dengan penggunaan SRIKANDI yang didasarkan pada Nota Dinas dan Undangan.
- Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran telah terlaksana, dengan capaian pada aplikasi SAKTI menunjukkan realisasi anggaran Biro Hukum dan Organisasi sebesar 29,75%.
- Penyusunan RPD tertunda dan akan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas permintaan dari unit koordinator.
- Monitoring dan evaluasi pencatatan SIRUP telah terlaksana, dengan pencatatan SIRUP yang telah dilakukan pada triwulan I.
- Monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi e-Kinerja BKN tertunda karena penetapan Perjanjian Kinerja, penilaian SKP, serta target kinerja pegawai untuk triwulan I akan dilaksanakan pada triwulan II.
- Penyusunan laporan capaian rencana aksi output prioritas nasional tertunda, karena laporan RO RB Triwulan I terkait capaian Kegiatan Prioritas Nasional belum disusun menunggu Nota Dinas permintaan dari koordinator.
- Penyusunan bahan materi rapat evaluasi dan perencanaan program tingkat pimpinan telah terlaksana melalui penyusunan konsep sambutan apel Sekretaris Kementerian sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi.
- Dukungan publikasi konten dan penggunaan logo BerAKHLAK telah terlaksana dengan penggunaan logo BerAKHLAK pada bahan paparan dan konten publikasi.

Kesimpulan :

Triwulan I tahun 2025, nilai mandiri berdasarkan aktivitas kegiatan yang telah dilaksanakan untuk Biro Hukum dan Organisasi adalah 25%

Hingga Triwulan I tahun 2025, aktivitas kegiatan yang dapat mendorong tinggi tercapainya IKU Pelaksanaan RB Biro Umum dan SDM adalah :

- Pemenuhan Bukti Dukung Rencana Aksi RB Triwulan I telah terlaksana. Bukti dukung untuk setiap rencana aksi RB pada triwulan I telah dipenuhi, dan salah satunya sudah terkompilasi dalam narasi kinerja. Contohnya, untuk rencana aksi terkait penguatan Indeks Sistem Merit, telah dilakukan:
- Pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan (tugas belajar dan tugas belajar mandiri) yang telah dipenuhi oleh minimal 3 ASN.
- Pemanfaatan aplikasi e-Kinerja BKN yang sudah digunakan untuk pengelolaan kinerja di Kemenko Perekonomian.
- Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU telah terlaksana. Pada triwulan I, telah dilakukan penetapan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi, serta finalisasi Manual IKU Biro Umum dan Sumber Daya Manusia untuk tahun 2025.
- Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I telah terlaksana. Pada triwulan I, telah dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I berdasarkan realisasi kinerja yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja Biro Umum dan Sumber Daya Manusia tahun 2025.
- Penyusunan Renja 2026 telah terlaksana. Telah dilakukan penyusunan untuk Rencana Kerja (Renja) pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025–2029.
- Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI Triwulan I telah terlaksana. Telah dilakukan sejumlah upaya dalam mengoptimalkan pemanfaatan SRIKANDI untuk Biro Hukum dan Organisasi, seperti:
- Koordinasi dengan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.
- Pelaksanaan Sosialisasi Aplikasi SRIKANDI di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada bulan Maret 2025.
- Monitoring Realisasi Anggaran Triwulan I telah terlaksana. Monitoring ini dilakukan melalui aplikasi SAKTI, yang menunjukkan realisasi anggaran sebesar 29,75% hingga triwulan I.
- Penyusunan RPD Triwulan I telah terlaksana. Penyusunan HOK (Hari Orang Kerja) telah dilakukan berdasarkan data perencanaan program dan anggaran dari unit Eselon II.
- Monitoring Pencatatan SIRUP Triwulan I telah terlaksana. Monitoring dilakukan melalui pencatatan SIRUP oleh Pejabat Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ).
- Monitoring Pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja BKN telah terlaksana. Pada triwulan I, kegiatan monitoring menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja ASN telah dilakukan melalui aplikasi e-Kinerja BKN, sesuai dengan perencanaan
- Penyusunan Bahan LOM Triwulan I telah terlaksana. Penyusunan dilakukan oleh Biro Umum dan Sumber Daya Manusia dan telah dituangkan ke dalam konsep sambutan apel Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang memuat laporan pelaksanaan tugas triwulan I tahun 2025. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN. Sebagai bentuk penegasan, telah diterbitkan Nota Dinas Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Nomor KP.05.08/310/SET.M.EKON.4/05/2025 perihal Pengelolaan Kinerja ASN Tahun 2025. Nota Dinas ini menegaskan bahwa seluruh pegawai wajib menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan berbasis matriks peran hasil yang diperoleh melalui dialog kinerja. SKP yang disusun harus mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit Kerja.

Dengan demikian, diharapkan seluruh pegawai dapat bekerja lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil sesuai dengan target kinerja organisasi.

- Dukungan Publikasi Konten dan Penggunaan Logo BerAKHLAK Triwulan I telah terlaksana. Penggunaan logo BerAKHLAK telah diterapkan pada berbagai media publikasi, seperti paparan dan konten lainnya yang disusun oleh Biro Hukum dan Organisasi.

Kesimpulan :

Triwulan I tahun 2025, nilai mandiri berdasarkan aktivitas kegiatan yang telah dilaksanakan untuk Biro Umum dan SDM adalah 25%

Hingga Triwulan I tahun 2025, aktivitas kegiatan yang dapat mendongkrak tinggi tercapainya IKU Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Persidangan adalah :

- Pemenuhan Bukti Dukung Rencana Aksi RB Triwulan I telah terlaksana. Bukti dukung untuk setiap rencana aksi RB pada triwulan I telah dipenuhi, dan salah satunya sudah terkompilasi dalam narasi kinerja
- Penyusunan RPD Triwulan I telah terlaksana. Penyusunan HOK (Hari Orang Kerja) telah dilakukan berdasarkan data perencanaan program dan anggaran dari unit Eselon II.

Kesimpulan :

Triwulan I tahun 2025, nilai mandiri berdasarkan aktivitas kegiatan yang telah dilaksanakan untuk Biro KLIP adalah 25%

Hingga Triwulan I tahun 2025, aktivitas kegiatan yang dapat mendongkrak tinggi tercapainya IKU Pelaksanaan Reformasi Inspektorat Kemenko Ekon adalah :

- Pelaksanaan rapat penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) Reformasi Birokrasi (RB) Triwulan IV TA 2024
- Penyusunan LHEI RB Triwulan IV TA 2024
- Pelaksanaan rapat evaluasi hasil sementara RB tahun 2024 dan pendalaman bukti dukung sanggah evaluasi RB
- Pelaksanaan rapat pembahasan target capaian RB General tahun 2025

Kesimpulan :

Triwulan I tahun 2025, nilai mandiri berdasarkan aktivitas kegiatan yang telah dilaksanakan untuk Inspektorat adalah 25%

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dihitung berdasarkan jumlah agregat dari persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan RB Tematik di level eselon II dibandingkan dengan jumlah unit Eselon II di lingkungan Sekretariat yang melaksanakan seluruh rencana aksi. Nilai akhir penjumlahan dari IKU ini adalah 25%

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

IKU 6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> Telah melaksanakan rapat koordinasi pengelolaan kinerja dengan Sekretariat dan Kebiroan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Telah melaksanakan coaching clinic pendampingan penyusunan kinerja dan kerja sama yang selaras dengan sasaran dan indikator kinerja pada UND Nomor surat EK.05/10/D.I.M.EKON.1/04/2025 dapat dilihat pada link https://bit.ly/45BRPRt Telah melaksanakan dokumen penyelarasan kinerja dari level Menteri hingga level eselon II (Kebiroan) dokumen tersebut dapat diakses pada link https://bit.ly/45IQeQI Seluruh dokumen perencanaan kinerja perjanjian kinerja 2025 dapat di akses pada link http://bit.ly/4oycEG5
2.	Penyusunan Laporan Kinerja TW I	Terlaksana	Sekretariat telah menyusun konsep draft laporan kinerja untuk https://bit.ly/4oDWMBJ
3.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI TW I	Terlaksana	Telah melaksanakan optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI TW I

Selain pelaksanaan rencana aksi diatas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi yang lancar dan feedback yang baik antara Sekretariat dengan unit-unit kerja di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian
- Pelaksanaan penyusunan matriks tindaklanjut atas penyusunan indikator kinerja tahun 2025
- Rutin melaksanakan monitoring atas pencapaian IKU Pelaksanaan RB di lingkungan Biro Manajemen Kinerja, Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan, Biro Hukum dan Organisasi, dan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia agar dapat memastikan bahwa target telah tercapai sesuai dengan rencana aksi yang sudah dibuat dan telah melibatkan semua pegawai di unit kerja
- Melaksanakan pembahasan terkait penetapan target-target indicator kinerja
- Melakukan koordinasi revisi anggaran dengan seluruh pokja
- Menyusun alur mekanisme kerja di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi untuk menetapkan PIC dalam dukungan teknis dan administrative

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya

- Melaksanakan digitalisasi dalam pengolahan akses dan data
- Menggunakan penyimpanan berbasis CLOUD
- Koordinasi menggunakan fasilitas *Zoom Meeting*
- Melaksanakan pelatihan atau *Coaching clinic* dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan pegawai
- Meningkatkan koordinasi antar unit kerja
- Melaksanakan 2 kegiatan dalam satu waktu untuk meningkatkan efisinsi dan efektifitas

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Pengawasan dalam pelaksanaan rencana aksi masih dirasa kurang
- Hingga triwulan I, rencana aksi sedang dalam proses perumusan dikarenakan perlu melakukan penyesuaian dengan kebijakan nasional pelaksanaan RB 2025–2029 dari Kemen PAN RB.
- Perlu dilakukan penyesuaian dokumen kinerja organisasi dengan RPJMN 2025–2029 sehingga dokumen perencanaan organisasi masih dalam proses penyusunan pada triwulan I.
- Penggunaan SRIKANDI di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi masih perlu ditingkatkan hingga level pelaksana

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Rutin melaksanakan koordinasi dan monitoring kepada para PIC yang mengampu agar dapat berjalan dan menghasilkan output yang telah ditetapkan
- Melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan KemenPANRB untuk memperoleh informasi yang akurat.
- Aktif dalam melakukan bimbingan kearsipan pada seluruh pegawai Biro Hukum dan Organisasi

Jakarta, April 2025
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Susiwijono